

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang mencakup berbagai perubahan yang mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat dan institusi-institusi nasional, disamping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan penanganan ketimpangan pendapatan (Todaro dan Smith, 2011). Pembangunan ekonomi tersebut mencakup berbagai aspek-aspek pembentuk seperti ekonomi, sosial, politik dan lainnya dimana aspek-aspek tersebut saling bersinergi untuk mencapai keberhasilan pembangunan baik di tingkat pusat maupun daerah. Proses pembangunan sering kali dikaitkan dengan proses industrialisasi. Proses industrialisasi merupakan satu alur kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam arti tingkat hidup yang lebih bermutu.

Menurut Arsyad (2010), sektor industri mempunyai peran sebagai sektor pemimpin (leading sector). dikarenakan dengan adanya pembangunan sektor industri maka akan sanggup mendorong pembangunan di sektor lainnya, seperti sektor pertanian dan sektor jasa, sehingga nantinya akan berpengaruh pada meluasnya lapangan kerja yang akan meningkatkan pendapatan dan permintaan masyarakat (daya beli). Peningkatan terhadap pendapatan dan daya beli masyarakat menggambarkan bahwa perekonomian tumbuh dengan baik. Sektor

industri merupakan salah satu sektor ekonomi yang sedang dikembangkan di Indonesia sebagai faktor penggerak kemajuan sektor-sektor ekonomi lainnya.

**Tabel 1.1 Jumlah Tenaga Kerja Industri Kecil, Menengah dan Besar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2020**

<b>Kab/Kota</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Bogor	416643	416643	416643
Sukabumi	334664	346090	346090
Cianjur	167224	167224	167224
Bandung	260995	274704	275076
Garut	201770	201795	201795
Tasikmalaya	172368	172583	172741
Ciamis	192504	192601	193011
Kuningan	194324	195178	195178
Cirebon	104863	113434	113434
Majalengka	182547	182849	182849
Sumedang	170021	170021	170021
Indramayu	124872	124872	125229
Subang	149996	151543	151543
Purwakarta	158584	158584	158584
Karawang	426506	427221	427221
Bekasi	845393	849751	849751
Bandung Barat	27680	27909	27909
Pangandaran	1279	2159	2161
Kota Bogor	284492	284492	284492
Kota Sukabumi	133229	133229	133229
Kota Bandung	129208	129208	129441
Kota Cirebon	162220	162220	162220
Kota Bekasi	131004	131224	131224
Kota Depok	174218	174249	174249
Kota Cimahi	194877	194877	194877
Kota Tasikmalaya	124142	124142	124142
Kota Banjar	159822	159903	159903

Sumber:Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov Jawa Barat

Dilihat dari tabel 1.1 apabila jumlah lapangan kerja semakin banyak akan diikuti dengan banyaknya jumlah tenaga kerja yang terserap, maka akan berpotensi menurunkan jumlah penduduk miskin yang berakibat pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Angkatan kerja yang bekerja selama tahun 2018-2020 terus mengalami peningkatan dengan rata-rata penyerapan tenaga kerja sebesar 209.436 jiwa per tahun.

Menurut kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi mampu menyerap tenaga kerja terbesar dibanding kabupaten/kota lainnya yaitu rata-rata sebesar 848.298 jiwa per tahun, diikuti Kabupaten Karawang dengan penyerapan tenaga kerja rata-rata sebanyak 426.982 jiwa per tahun dan Kabupaten Bogor dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 416.643 jiwa per tahun. Kemudian Kabupaten Indramayu mampu menyerap tenaga kerja terendah yaitu sebesar 124.991 jiwa pertahun, diikuti Kabupaten Bandung Barat dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 27.832 jiwa pertahun dan Kabupaten Pangandaran dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 1.866 jiwa pertahun.

Dalam 2 tahun terakhir terjadi suatu fenomena tersebarnya covid-19 yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja. Merebaknya covid-19 telah menginfeksi hampir seluruh negara di dunia. Hingga saat ini, dengan adanya pandemi covid-19 melemahkan perekonomian dunia menyebabkan kebijakan pembangunan berubah haluan.

Begitu pula dengan kebijakan perencanaan tenaga kerja (Sulistiawati, 2020). secara tidak langsung, perusahaan harus mengurangi jumlah pekerjanya agar dapat mencegah penyebaran penyakit tersebut. Selain untuk mencegah penyebaran virus covid-19, perusahaan mengambil langkah tersebut juga bertujuan untuk mencegah kerugian yang diakibatkan oleh covid-19. Menurut pemeriksaan ILO (International Labor Organization) karena tindakan isolasi total atau sebagian, saat ini mempengaruhi hampir 2,7 miliar pekerja. Para pekerja ini sudah mencapai 81%. Pada situasi saat ini, perusahaan di berbagai sektor ekonomi menghadapi krisis ekonomi terutama di perusahaan kecil. Jutaan pekerja dapat dengan mudah kehilangan pekerjaan dan penghasilan mereka dan menghadapi PHK (Syahrial, 2020).

Dikutip dari liputan6.com, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengungkapkan adanya penurunan serapan tenaga kerja pada sektor industri pengolahan di masa pandemi Covid-19. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri Kementerian Perindustrian Eko Cahyanto menyebutkan bahwa, hingga Agustus 2020, penyerapan tenaga kerja di industri pengolahan hanya mencapai 17,48 juta atau sekitar 13,61 persen dari total tenaga kerja nasional. Hal ini dapat memberi gambaran bahwa dampak yang ditimbulkan oleh adanya virus covid-19 yang terjadi di Indonesia berdampak sangat besar terhadap penyerapan tenaga kerja pada sektor industri pengolahan secara menyeluruh di berbagai wilayah di Indonesia.

**Tabel 1.2 Jumlah Unit Usaha Industri Kecil, Menengah dan Besar di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2020**

<b>Kab/Kota</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Bogor	15961	16049	16052
Sukabumi	16165	16166	16190
Cianjur	1335	1346	1350
Bandung	14229	14233	14236
Garut	9993	10000	10005
Tasikmalaya	1526	1551	1575
Ciamis	1534	1539	1584
Kuningan	2534	2573	2592
Cirebon	10942	11144	11349
Majalengka	7473	7475	7499
Sumedang	5254	5254	5267
Indramayu	2429	2430	2477
Subang	3498	3538	3541
Purwakarta	11125	11125	11129
Karawang	10548	10553	10556
Bekasi	12639	12653	12654
Bandung Barat	384	389	390
Pangandaran	495	531	532
Kota Bogor	8875	8875	8876
Kota Sukabumi	9571	9571	9575
Kota Bandung	11124	11124	11130
Kota Cirebon	9450	9452	9456
Kota Bekasi	10418	10433	10436
Kota Depok	10540	10549	10559
Kota Cimahi	6181	6181	6186
Kota Tasikmalaya	10005	10005	10014
Kota Banjar	9798	9821	9821

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov Jawa Barat

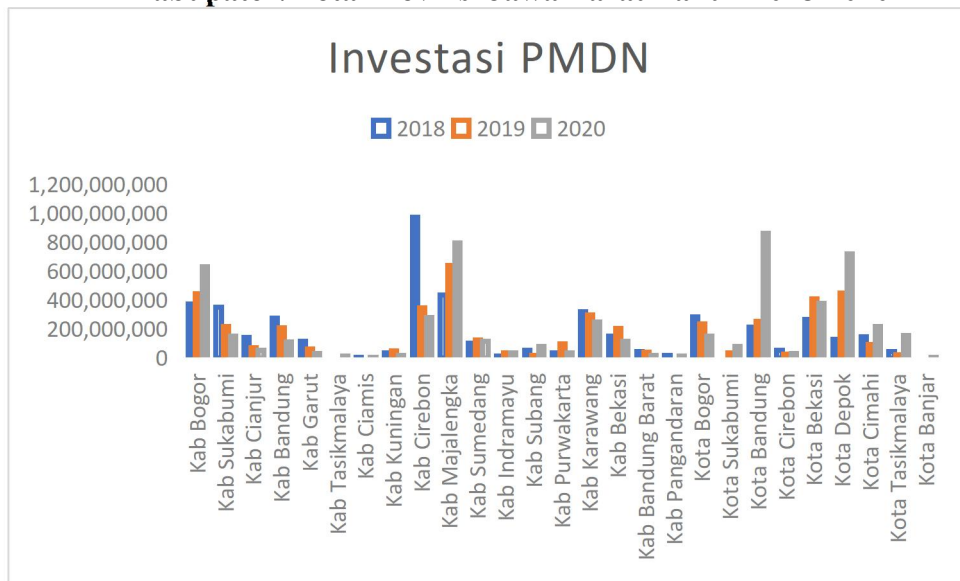
Berdasarkan tabel 1.2 menggambarkan jumlah unit usaha di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat tahun 2020. Kabupaten Sukabumi berkontribusi terbesar pada sektor industri dengan jumlah unit usaha terbanyak pertama di Jawa Barat dengan jumlah 16.190 unit usaha, dan dilanjutkan dengan Kabupaten Bogor 16.052 unit usaha, dan yang ketiga Kabupaten Bandung dengan jumlah 14.236 unit usaha. Bandung Raya dan Kota Cimahi termasuk pada urutan ke 2 Kota atau Kabupaten yang berkontribusi sedikit yaitu sebanyak 6.186 unit usaha terhadap sektor industri di Jawa Barat setelah Kabupaten Bandung Barat sebanyak 390 unit usaha dikarenakan pada kedua kota tersebut merupakan kota yang terdampak covid paling tinggi sehingga terjadi penurunan jumlah unit usaha dikarenakan kebijakan pemerintah yang memberlakukan PPKM sehingga berdampak pada permintaan produksi yang menurun.

Penyerapan tenaga kerja juga tidak terlepas dari peranan pemerintah sebagai penyusun kebijakan yang mendukung terciptanya iklim investasi yang baik, serta strategi-strategi yang dilakukan demi tercapainya tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Stabilitas perekonomian juga diperlukan untuk menjamin perekonomian berjalan dengan lancar. Penyediaan lapangan kerja yang besar diperlukan untuk mengimbangi pertumbuhan penduduk. Perbaikan kualitas sumber daya manusia juga mutlak diperlukan karena merupakan modal pembangunan. Tersedianya tenaga kerja yang besar jika dimanfaatkan, dibina, dan dikerahkan untuk bisa terserap di sektor ini dan menciptakan tenaga kerja yang efektif akan menjadi modal yang besar dalam pelaksanaan pembangunan diberbagai sektor.

Peningkatan kapasitas produksi dalam kegiatan investasi diperoleh melalui kegiatan investasi, baik yang merupakan investasi swasta (*Private Investment*) yang bisa disebut dengan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun investasi luar negeri yang disebut dengan Penanaman Modal Asing (PMA). Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dapat diartikan sebagai pengeluaran atau pembelanjaan penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang produksi, untuk menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian yang berasal dari investasi dalam negeri. Di sisi lain, Penanaman Modal Asing (PMA) sangat diperlukan dalam upaya meningkatkan nilai output suatu daerah, mempercepat pembangunan ekonomi, dan membantu industrialisasi dalam membangun modal *overhead* ekonomi serta dalam menciptakan kesempatan kerja yang lebih luas.

Grafik dibawah ini menggambarkan bagaimana perkembangan realisasi investasi PMDN dan PMA di Jawa Barat selama kurun waktu 3 tahun yaitu dari tahun 2018-2020.

**Grafik 1.1 Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)  
Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2020**

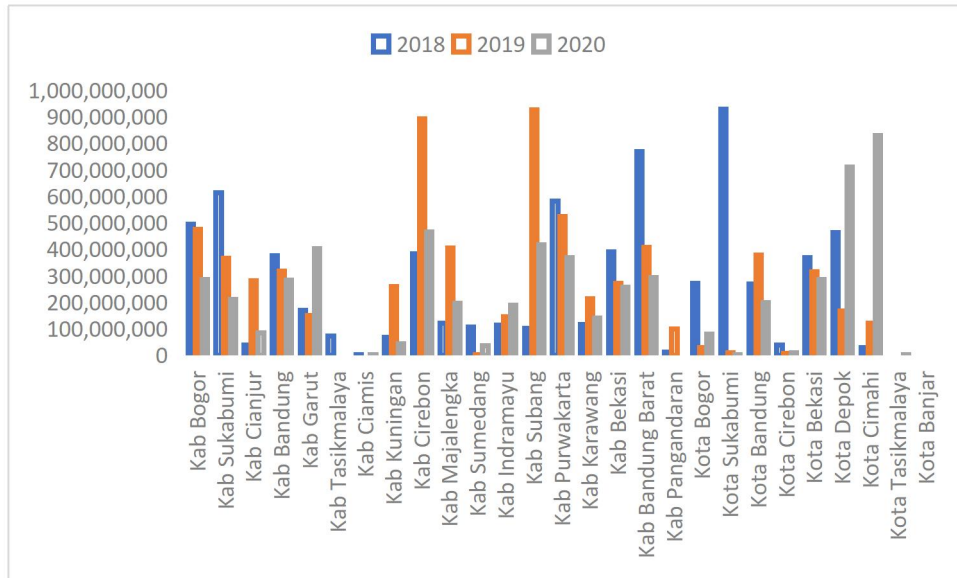


Sumber : Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jawa Barat

Berdasarkan grafik 1.1 diatas, realisasi investasi PMDN di Jawa Barat selama kurun waktu 3 tahun yaitu dari tahun 2018-2020 ada banyak Kabupaten/Kota yang mengalami fluktuatif. Berdasarkan 27 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat pada tahun 2020 Kabupaten Bekasi merupakan daerah realisasi investasi PMDN tertinggi dibanding kabupaten/kota lain yakni sebesar Rp. 114.144.161, kemudian angka terendah pada Kabupaten Ciamis sebesar Rp. 254.700.



**Grafik 1.2 Realisasi Investasi Penanaman Modal Luar Negeri/Asing (PMA) di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2020**



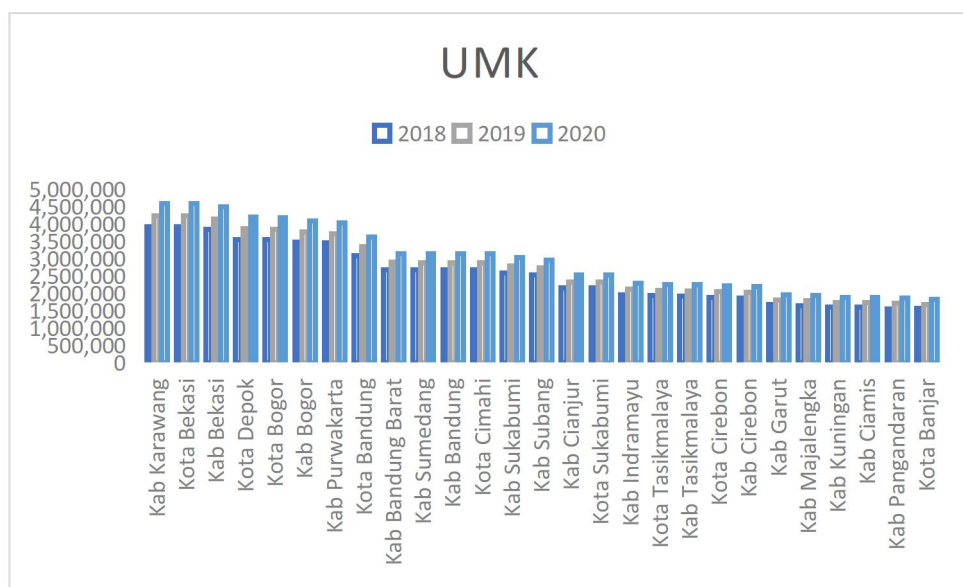
Sumber : Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Berdasarkan grafik 1.2 diatas, dapat dilihat realisasi investasi Penanaman Modal Luar Negeri/Asing menurut di Jawa Barat dari tahun 2018- 2020. Berdasarkan data tersebut realisasi investasi PMA di Jawa Barat setiap tahunnya mengalami perubahan atau bersifat fluktuatif. Berdasarkan 27 kabupaten/kota di Jawa Barat dari tahun 2018-2020 Kabupaten Bekasi merupakan kabupaten/kota dengan realisasi investasi PMA tertinggi sebesar Rp. 307.072.095 diantara kabupaten/kota lainnya di Jawa Barat, sedangkan Kota Banjar memiliki realisasi investasi PMA terendah sebesar Rp. 0 dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Jawa Barat.

Faktor lain yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja industri manufaktur di Jawa Barat yaitu upah. Teori upah menjelaskan bahwa upah ditentukan oleh pertemuan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja. Upah akan mempengaruhi tinggi rendahnya biaya produksi industri, upah yang tinggi membuat biaya produksi industri juga meningkat. Mengakibatkan harga suatu produk juga meningkat, hal ini menurunkan jumlah permintaan tenaga kerja.

Upah minimum regional merupakan upah yang diterima pekerja dan harus dibayarkan oleh perusahaan kepada pekerja yang ditetapkan oleh pemerintah di suatu daerah. Sedangkan upah rata-rata provinsi adalah jumlah rata-rata upah minimum di seluruh provinsi (Statistik Indonesia, 2007).

**Grafik 1.3**  
**Upah Minimum Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2020**



Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat

Pada grafik 1.3 menunjukkan mengenai Upah Minimum Kabupaten (UMK) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2020 dimana UMK tersebut menggambarkan rata-rata upah minimum per kabupaten/kota di Jawa Barat. UMK Provinsi Jawa Barat selama 3 tahun terakhir menunjukkan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2020 UMK yang tertinggi pada Kabupaten Karawang yakni sebesar Rp. 4.594.325, kemudian UMK yang terendah pada Kota Banjar yakni sebesar Rp. 1.831.884. Walaupun begitu di beberapa kota/kabupaten di Jawa Barat upah minimum nya mengalami kenaikan. Kenaikan upah minimum bisa menyebabkan pengurangan penyerapan tenaga kerja apabila dilihat dari sisi permintaan tenaga kerja, oleh karenanya hal tersebut dapat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja terutama pada sektor industri.

Berdasarkan fenomena diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2020** “.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang ingin penulis teliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana karakteristik jumlah unit usaha, investasi PMDN, investasi PMA dan UMK pada penyerapan tenaga kerja sektor industri pengolahan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat selama kurun waktu yang diamati?
2. Bagaimana pengaruh jumlah unit usaha, investasi PMDN, investasi PMA dan UMK pada penyerapan tenaga kerja sektor industri pengolahan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui karakteristik jumlah unit usaha, investasi PMDN, investasi PMA dan UMK pada penyerapan tenaga kerja sektor industri pengolahan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat
2. Untuk mengetahui pengaruh jumlah unit usaha, investasi PMDN, investasi PMA dan UMK pada penyerapan tenaga kerja sektor industri pengolahan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat.

## **1.4. Kegunaan Penelitian**

### **1.4.1. Kegunaan Teoritis**

Adapun kegunaan teoritis dari penelitian ini yaitu mengharapkan hasil dari penelitian guna untuk memberikan sumber informasi khususnya pada kajian ilmu ekonomi yang berkaitan dengan penelitian ini.

### **1.4.2. Kegunaan Praktis**

1. Guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan.
2. Sebagai acuan dalam penelitian sejenis di masa yang akan datang.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA, PENELITIAN TERDAHULU, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS**

#### **2.1 Kajian Teori**

##### **2.1.1 Penyerapan Tenaga Kerja**

Kesempatan kerja adalah banyaknya orang yang dapat tertampung untuk bekerja pada suatu unit usaha atau lapangan pekerjaan. Kesempatan kerja ini akan menampung semua tenaga kerja apabila unit usaha atau lapangan pekerjaan yang tersedia mencukupi atau seimbang dengan banyaknya tenaga kerja yang ada. Adapun lapangan pekerjaan adalah bidang kegiatan usaha atau intansi dimana seseorang bekerja atau pernah bekerja.

Teori permintaan menerangkan tentang ciri hubungan antara jumlah permintaan dengan harga. Sehubungan dengan tenaga kerja, permintaan tenaga kerja berarti hubungan antara tingkat upah dengan kuantitas tenaga kerja yang dikehendaki untuk dipekerjakan. Permintaan pengusaha atas tenaga kerja berlainan dengan permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa. Masyarakat membeli barang dan jasa karena barang dan jasa tersebut memberikan kepuasan kepadanya. Sementara pengusaha mempekerjakan seseorang karena orang tersebut membantu memproduksi barang dan jasa untuk dijual kepada masyarakat. Dengan kata lain, penambahan permintaan terhadap tenaga kerja bergantung pertambahan permintaan masyarakat akan barang dan jasa yang diproduksi. Permintaan tenaga kerja yang seperti itu dinamakan *derived demand*.

Menurut Todaro (2003) Penyerapan tenaga kerja adalah diterimanya para pelaku tenaga kerja untuk melakukan tugas sebagaimana mestinya atau adanya suatu keadaan yang menggambarkan tersedianya pekerja atau lapangan pekerjaan untuk diisi oleh pencari pekerjaan. Secara umum, penyerapan tenaga kerja tersebut menunjukkan seberapa besar suatu perusahaan dalam menyerap tenaga kerja untuk menghasilkan suatu produk, kemampuan untuk menyerap tenaga kerja berbeda dari satu sektor lainnya (Sumarsono, 2003).

### **2.1.2 Jumlah Unit Usaha**

Badan Pusat Statistik mendefinisikan unit usaha adalah unit yang melakukan kegiatan yang dilakukan oleh perseorangan atau rumah tangga maupun suatu badan dan mempunyai kewenangan yang ditentukan berdasarkan kebenaran lokasi bangunan fisik, dan wilayah operasinya. Secara umum, pertumbuhan unit usaha suatu sektor dalam hal ini industri kecil dan menengah pada suatu daerah akan menambah jumlah lapangan pekerjaan.

Hal ini berarti permintaan tenaga kerja juga bertambah. Jumlah unit usaha mempunyai pengaruh yang positif terhadap permintaan tenaga kerja, artinya jika unit usaha suatu industri ditambah maka permintaan tenaga kerja juga bertambah. Semakin banyak jumlah perusahaan atau unit usaha yang berdiri maka akan semakin banyak untuk terjadi penambahan tenaga kerja (Azis Prabowo, 2012).

### **2.1.3 Investasi**

Investasi merupakan penanaman modal pada suatu perusahaan dalam rangka untuk menambah barang-barang modal dan perlengkapan produksi yang sudah ada supaya menambah jumlah produksi. Investasi yang naik dari tahun ke tahun akan

menyebabkan penyerapan Angkatan kerja yang bekerja akan semakin besar dengan tingginya investasi maka proses produksi naik dan semakin banyak membutuhkan angkatan kerja yang bekerja (Sadono Sukirno, 2010).

Salah satu faktor untuk menaikkan tingkat pembangunan daerah adalah dengan tersedianya modal dalam bentuk investasi. Ketiadaan modal dalam pembangunan merupakan faktor penghambat terhadap pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. Salah satu ciri negara berkembang adalah ketidakadanya modal yang mencukupi untuk pembangunan. Dalam jangka panjang pertumbuhan investasi berpengaruh pada bertambahnya stok capital dan selanjutnya menaikkan produktivitas.

### **2.1.3.1 Teori Investasi Harrod-Domar**

Harrod-Domar mempertahankan pendapat dari para ahli ekonomi sebelumnya yang merupakan gabungan dari pendapat kaum klasik dan Keynes, dimana beliau menekankan peranan pertumbuhan modal dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi. Teori Harrod-Domar memandang bahwa pembentukan modal dianggap sebagai pengeluaran yang akan menambah kemampuan suatu perekonomian untuk menghasilkan barang dan atau jasa, maupun sebagai pengeluaran yang akan menambah permintaan efektif seluruh masyarakat. Dimana apabila pada suatu masa tertentu dilakukan sejumlah pembentukan modal, maka pada masa berikutnya perekonomian tersebut mempunyai kemampuan untuk menghasilkan barang-barang atau jasa yang lebih besar (Sadono, 2007)

Dalam Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, penanaman modal dibagi menjadi 2 yaitu:

- a. *Foreign Investment*/Penanaman Modal Asing (PMA) Pengertian modal asing adalah pembayaran luar negeri yang bukan merupakan bagian dari kekayaan



devisa Indonesia, yang dengan persetujuan pemerintah digunakan untuk pembiayaan perusahaan di Indonesia.

Penanaman modal asing dapat dilakukan dalam bentuk:

- 1) Penanaman Modal Asing Langsung (*Foreign Direct Investment/FDI*) dalam arti seluruh modal yang dimiliki oleh warga negara dan atau badan hukum asing, dengan ketentuan jangka waktu paling lama 15 tahun sejak produksi komersil. Sebagian saham asing harus dijual kepada warga negara atau badan hukum Indonesia melalui pemilikan langsung atau pasar modal.
  - 2) Penanaman Modal Asing Tidak Langsung (*Foreign Indirect Investment*) adalah usaha patungan antara modal asing dengan modal yang dimiliki oleh warga negara atau badan hukum Indonesia, dengan ketentuan peserta Indonesia harus memiliki paling sedikit 5% dari modal yang disetor sejak pendirian perusahaan penanam modal asing. Ketentuan usaha patungan ini bersifat wajib bagi kegiatan investasi yang dilakukan dalam 9 sektor publik, yaitu pelabuhan, produksi, transisi, serta distribusi tenaga listrik untuk umum, telekomunikasi, pembangkit tenaga atom, dan media massa.
- b. *Domestic Investmen*/Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Modal dalam negeri adalah bagian dari kekayaan masyarakat Indonesia termasuk hak-hak dan benda-benda, baik yang dimiliki oleh negara ataupun swasta nasional atau swasta asing yang berdomisili di Indonesia. Pihak swasta yang memiliki modal dalam negeri tersebut. Dapat secara perorangan dana atau badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia.

Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk:

1. Penanaman modal dalam negeri langsung (*Domestic Direct Investment/DDI*) Yaitu penanaman modal oleh pemiliknya sendiri.
2. Penanaman modal dalam negeri tidak langsung (*Indirect Investment/DDI*) Yaitu melalui pembelian obligasi-obligasi, emisi-emisi lainnya (saham-saham) yang dikeluarkan oleh perusahaan.

### **2.1.3.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Investasi**

Ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat investasi, terdiri dari tingkat keuntungan yang akan diperoleh, tingkat suku bunga, ramalan kondisi di masa depan, dan kemajuan teknologi. Berikut ini akan dibahas masing masing faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat investasi tersebut, yaitu :

- a. Tingkat Keuntungan yang akan diperoleh investor akan menanamkan modalnya pada jenis investasi yang memberikan prospek yang baik dan menguntungkan. Bila investasi yang dipilih sudah tidak menguntungkan lagi, investor akan berpindah pada jenis lain yang lebih menguntungkan. Investor harus selalu mengamati kinerja perusahaan tempat ia menanamkan modalnya. Naik turunnya saham, dapat menjadi indikator apakah perusahaan tersebut memiliki kinerja yang baik atau tidak.
- b. Tingkat Suku Bunga adalah investasi yang merupakan fungsi dari tingkat suku bunga. Hubungan antara investasi dengan suku bunga adalah negatif. Bila suku bunga tinggi, maka jumlah investasi menurun. Begitu pula sebaliknya, jumlah investasi akan semakin banyak pada saat tingkat suku bunga *relative* rendah.
- c. Ramalan Kondisi Di Masa Depan yaitu apabila diramalkan kondisi ekonomi di masa yang akan datang menggairahkan dan memiliki prospek yang menguntungkan, maka akan mendorong pertumbuhan investasi. Pertumbuhan

yang tinggi dan tingkat harga yang stabil menjadi pemicu laju investasi. Semakin baik kondisi perekonomian akan meningkatkan tingkat keuntungan para pengusaha.

- d. Kemajuan Teknologi merupakan teknologi tinggi dan tepat guna mampu meningkatkan produktivitas sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi. Karena produktivitas yang tinggi akan meningkatkan pendapatan perusahaan, dan pada akhirnya akan dinikmati oleh pekerja. Meningkatnya pendapatan akan mendorong jumlah konsumsi, sehingga mendorong laju investasi. Bila kondisi ini tercipta secara terus menerus akan mempercepat laju pertumbuhan ekonomi.

Sebagai sebuah keputusan yang rasional, investasi sangat ditentukan oleh dua faktor utama, yaitu tingkat pengembalian yang diharapkan dan biaya investasi.

1. Tingkat Pengembalian Yang Diharapkan (*Expected Rate Of Return*) kemampuan perusahaan menentukan tingkat investasi yang diharapkan, sangat dipengaruhi oleh kondisi internal dan eksternal perusahaan.
  - a. Kondisi Internal Perusahaan, kondisi internal adalah faktor-faktor yang berada di bawah *control* (kontrol) perusahaan, misalnya tingkat efisiensi, kualitas SDM dan teknologi yang digunakan. Ketiga aspek tersebut berhubungan positif dengan tingkat pengembalian yang diharapkan. Artinya, makin tinggi tingkat efisiensi, kualitas SDM dan teknologi, maka tingkat pengembalian yang diharapkan makin tinggi. Selain ketiga aspek teknis tersebut diatas, tingkat pengembalian yang diharapkan juga dipengaruhi oleh faktor-faktor non-teknis, terutama di negara sedang berkembang.
  - b. Kondisi Eksternal Perusahaan, kondisi eksternal yang perlu dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan akan investasi terutama adalah perkiraan tentang tingkat produksi dan pertumbuhan ekonomi domestik maupun internasional. Jika

perkiraan tentang masa depan ekonomi nasional maupun dunia optimis, biasanya tingkat investasi meningkat, karena tingkat pengembalian investasi dapat dinaikkan.

2. Biaya Investasi yang paling menentukan tingkat biaya investasi adalah tingkat bunga pinjaman; makin tinggi tingkat bunganya, maka biaya investasi makin mahal. Akibatnya minat akan investasi makin menurun.

### **2.1.3.3 Manfaat Investasi**

- a. Investasi dapat menjadi salah satu alternatif untuk memecahkan kesulitan modal yang sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan pembangunan nasional.
- b. Industri yang dibangun dengan investasi akan berkontribusi dalam perbaikan sarana dan prasarana, yang pada gilirannya akan menunjang pertumbuhan industri-industri turutan di wilayah sekitarnya.
- c. Investasi turut serta membantu pemerintah memecahkan masalah lapangan kerja, yakni akan menciptakan lowongan kerja untuk tenaga kerja terampil maupun tenaga kerja yang tidak terampil.
- d. Investasi akan memperkenalkan teknologi dan pengetahuan baru yang bermanfaat bagi peningkatan keterampilan pekerja dan efisiensi produksi.
- e. Investasi akan memperbesar pemerolehan devisa yang didapatkan dari industri yang hasil produksinya sebagian besar ditujukan untuk ekspor.

### **2.1.4 Upah**

Upah dapat diartikan sebagai hak yang diterima oleh pekerja berupa imbalan dalam bentuk uang atas pekerjaan yang telah dilakukan seseorang terhadap perusahaan berdasarkan kesepakatan, perjanjian kerja dan peraturan. Dalam pengertian teori

ekonomi, upah yaitu pembayaran yang diperoleh berbagai bentuk jasa yang disediakan dan diberikan oleh tenaga kerja kepada pengusaha (Sukirno, 2012).

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 Tentang pengupahan, Pasal 1 Ayat (1) yang dimaksud dengan upah adalah upah pekerja/karyawan hak untuk menerima dan melaporkan imbalan uang dari pemberi kerja, pekerja/majikan untuk menentukan dan membayar sesuai dengan perjanjian, perjanjian kerja, atau peraturan perundang-undangan, termasuk kompensasi kepada pekerja/karyawan dan keluarganya atas pekerjaan atau jasa yang dilakukan atau akan dilakukan (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.78, 2015).

#### **2.1.4.1 Jenis-Jenis Upah**

Jenis-jenis upah dalam berbagai kepustakaan hukum ketenagakerjaan di bidang hubungan kerja dapat dikemukakan (Zaeni Asyhadie, 2007) sebagai berikut:

- a) Upah Minimal adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara tunai kepada pekerja atau buruh yang berhak sebagai imbalan atas pengerahan jasa-jasa atau pelayanannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian.
- b) Upah Nyata adalah uang nyata yang benar-benar harus diterima oleh seorang pekerja/buruh yang berhak.
- c) Upah Hidup yaitu upah yang diterima pekerja/buruh relatif cukup untuk membiayai keperluan hidupnya secara luas, yang bukan hanya kebutuhan pokoknya, melainkan juga kebutuhan sosial keluarganya. Seperti, pendidikan dan asuransi.
- d) Upah Minimum yaitu upah terhadap yang akan dijadikan standar, oleh pengusaha untuk menentukan upah yang sebenarnya dari pekerja/buruh yang bekerja diperusahaannya.

#### **2.1.4.2 Teori Upah Minimum**

- a. Teori upah didefinisikan sebagai hak yang harus diterima oleh buruh atau tenaga kerja dalam bentuk uang yang diberikan oleh perusahaan atau pengusaha karena telah menggunakan tenaga dari buruh tersebut. Upah dibayarkan dengan melalui kesepakatan bersama antara pengusaha dengan buruh, yang di dalam upah tersebut sudah termasuk tunjangan untuk buruh beserta keluarga atas pekerjaan yang sudah dilakukannya (Tim Visi Yustisia, 2015)
- b. Teori upah menurut pertambahan produk marginal (neo klasik) mengemukakan bahwa dalam rangka memaksimalkan keuntungan tiap-tiap pengusaha menggunakan faktor-faktor produksi sedemikian rupa sehingga tiap faktor produksi yang dipergunakan menerima atau diberi imbalan sebesar nilai pertambahan hasil marginal dari faktor produksi tersebut. Pengusaha mempekerjakan sejumlah karyawan sedemikian rupa sehingga nilai pertambahan hasil marginal seseorang sama dengan upah yang diterima orang tersebut. Teori produktifitas marginal menyatakan bahwa biaya produksi tambahan yang dibayarkan kepada faktor produksi itu sama dengan hasil penjualan tambahan yang diperoleh dari produksi tambahan yang diciptakan oleh faktor produksi tersebut.

#### **2.1.4.3 Macam-Macam Upah Minimum**

##### **a. Upah Minimum Regional (UMR)**

Suatu standar yang digunakan oleh para pengusaha dan para industri dalam memberikan upah kepada pegawai, karyawan, atau guru dilakukan di lingkungan usaha atau pekerjaannya. Adanya penerapan gaji UMR digunakan untuk melindungi hak para tenaga kerja mendapatkan upah yang layak dan sesuai dengan beban kerja.

**b. Upah Minimum Provinsi (UMP)**

Penetapan upah minimum Provinsi atau Kabupaten/Kota ditetapkan oleh pihak berwajib yaitu Gubernur. Upah minimum Provinsi dihitung berdasarkan formula perhitungan upah minimum. Dalam hal ini Gubernur menetapkan upah minimum Provinsi dengan memperhatikan rekomendasi dewan pengupahan provinsi. Rekomendasi dewan pengupahan provinsi ini didasarkan pada hasil peninjauan kebutuhan hidup layak yang komponen dan jenisnya ditetapkan oleh menteri dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

**c. Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)**

Upah minimum Kabupaten/Kota harus lebih besar dari upah minimum Provinsi di Provinsi yang bersangkutan. Gubernur menetapkan upah minimum Kabupaten/Kota dengan memperhatikan rekomendasi Bupati/Walikota serta saran dan pertimbangan dewan pengupahan Provinsi. Rekomendasi Bupati/Walikota serta saran dan pertimbangan pengupahan Kabupaten/Kota.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Nama dan Judul Penelitian	Tujuan	Perbedaan dan Persamaan	Hasil
Ari Septiadi, Puspitasari Wahyu Anggraeni (2019) “Analisis Pengaruh Faktor - Faktor Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri Mikro Kecil di Indonesia”	Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat menyerap tenaga kerja sektor IMK secara maksimal di Indonesia tahun 2013-2015.	<b>Perbedaan :</b> Terletak pada lokasi penelitian <b>Persamaan :</b> Sama-sama meneliti mengenai penyerapan tenaga kerja	Jumlah Unit Usaha dan Nilai Output/Produksi berpengaruh positif dan signifikan, variabel Upah Minimum Regional (UMR) berpengaruh negatif dan signifikan, sedangkan variabel PDRB sektor Industri Pengolahan Non-Migas tidak berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja sektor Industri Mikro Kecil di Indonesia.
Ahdiyaty Rahmi A. Suaib dan Neli Agustina (2022)“Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Terdidik Sektor Industri Pengolahan di Pulau Jawa Tahun 2011-2019”	Untuk menganalisis variabel-variabel yang memengaruhi penyerapan tenaga kerja terdidik sektor industri pengolahan di Pulau Jawa tahun 2011-2019.	<b>Perbedaan :</b> Terletak pada lokasi penelitian <b>Persamaan :</b> Sama-sama meneliti mengenai penyerapan tenaga kerja	Hasil bahwa PDRB dan investasi sektor industri pengolahan berpengaruh positif dan signifikan, UMR berpengaruh negatif dan signifikan, sedangkan jumlah unit usaha industri memberikan hasil tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja terdidik industri pengolahan.
Edi Irawan (2021) “Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja Pada Industri Pengolahan Di Kabupaten Sumbawa Tahun 2011-2020”	Untuk mengetahui dan menganalisis tentang faktor – faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja pada industri pengolahan di Kabupaten Sumbawa dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2020.	<b>Persamaan :</b> Terletak pada lokasi penelitian <b>Perbedaan :</b> Sama-sama meneliti mengenai penyerapan tenaga kerja	Menunjukkan bahwa investasi pada sektor industri pengolahan, jumlah unit usaha pada sektor industri pengolahan serta pertumbuhan ekonomi daerah di Kabupaten Sumbawa secara bersama – sama berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja pada sektor industri pengolahan di Kabupaten Sumbawa.
Nawarti Bustamam dan Bella Octaviana (2021) “Analisis Sektor Industri Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Kota Pekanbaru”	Untuk mengetahui bagaimana peranan sektor industri terhadap penyerapan tenaga kerja di Kota Pekanbaru, kemudian untuk mengetahui seberapa besar	<b>Persamaan :</b> Terletak pada lokasi penelitian <b>Perbedaan :</b> Sama-sama meneliti mengenai penyerapan	Menunjukkan bahwa peranan sektor industri dalam penyerapan tenaga kerja di Kota Pekanbaru relatif kecil, dimana angka elastisitas hanya berkisaran antara - 0,11% sampai dengan 0,91%, kemudian besarnya peranan sektor industri kecil dalam penyerapan tenaga kerja di Kota Pekanbaru adalah sebesar 0,76% dan besarnya peranan sektor industri menengah dalam penyerapan



	peranan sektor industri kecil dan sektor industri menengah dalam penyerapan tenaga kerja di Kota Pekanbaru.	tenaga kerja	tenaga kerja di Kota Pekanbaru adalah sebesar 0,52%.
Rafika Mokodompis, Vekie Rumate Dan Mauna Maramis (2014) “Pengaruh Tingkat Investasi dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Pada Kota Manado Tahun 2003-2012)”	Untuk menganalisis bagaimana pengaruh tingkat investasi dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di kota Manado.	<b>Persamaan :</b> Terletak pada lokasi penelitian <b>Perbedaan :</b> Sama-sama meneliti mengenai penyerapan tenaga kerja	Menunjukkan bahwa penanaman modal dalam negeri (PMDN) berpengaruh positif dan tidak signifikan sedangkan penanaman modal asing (PMA) berpengaruh negative dan tidak signifikan. Untuk variabel tenaga kerja berpengaruh negative dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kota Manado.
Kurnia Martikasari (2016) “Pengaruh PMA, PMDN, Angkatan Kerja, Inflasi dan Ekspor Neto Terhadap PDRB Provinsi di Pulau Jawa”	Untuk menganalisis pengaruh Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), angkatan kerja, inflasi, dan ekspor neto terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) provinsi-provinsi di Pulau Jawa periode 1988-2010.	<b>Perbedaan :</b> Terletak pada lokasi penelitian <b>Persamaan :</b> Sama-sama meneliti mengenai penyerapan tenaga kerja	Hasil estimasi dengan menggunakan metode Fixed Effect menunjukkan bahwa, baik PMA, PMDN, maupun inflasi tidak mempengaruhi PDRB provinsi-provinsi di Pulau Jawa. PDRB provinsi-provinsi di Pulau Jawa selama periode 1988-2010 dipengaruhi secara signifikan oleh angkatan kerja dan ekspor neto.
Atifatur Rakhmawati , Arfida Boedirochminarni (2018) “Analisis Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri di Kabupaten Gresik”	Untuk menganalisis besar pengaruh jumlah Upah Minimum Kabupaten(UMK), jumlah industri, dan jumlah penduduk angkatan kerja terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri di kabupaten Gresik tahun 2007-2015.	<b>Persamaan :</b> Terletak pada lokasi penelitian <b>Perbedaan :</b> Sama-sama meneliti mengenai penyerapan tenaga kerja	Variabel Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan jumlah penduduk angkatan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri di kabupaten Gresik, sedangkan variabel jumlah industri berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri di kabupaten Gresik.

### **2.3 Kerangka Pemikiran**

Pembangunan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat. Pembangunan ekonomi tidak hanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi atas pendapatan perkapita tetapi juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

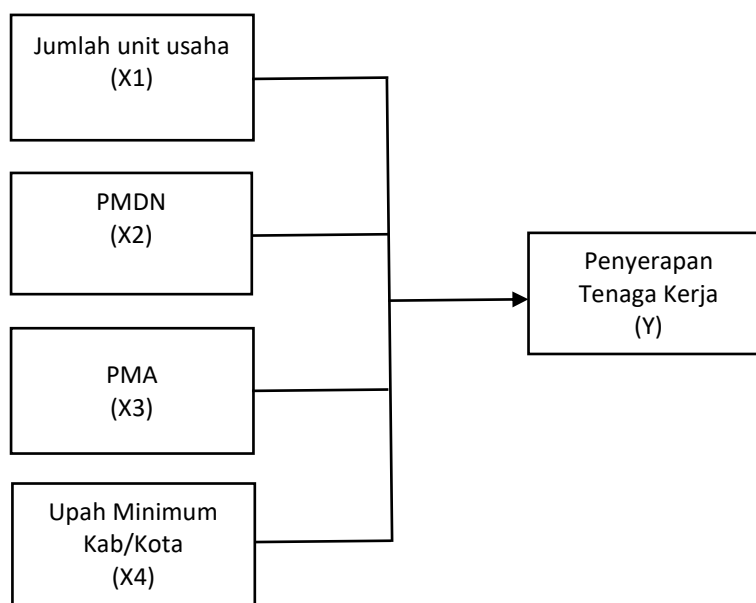
Jumlah unit usaha yang dimiliki suatu industri ditujukan untuk memperbesar jumlah output yang dihasilkan industri. Semakin berkembang suatu industri maka akan semakin besar unit usahanya. Jumlah unit usaha yang semakin besar akan memperbesar permintaan terhadap tenaga kerja. Oleh karena itu jumlah unit usaha memiliki hubungan yang positif terhadap jumlah penyerapan tenaga kerja. Semakin banyak unit usaha pada suatu industri akan semakin membuka kesempatan terhadap sektor usaha untuk melakukan permintaan tenaga kerja, sebaliknya Semakin sedikit jumlah unit usaha pada suatu industri akan semakin sedikit pula kesempatan kerja yang mampu diciptakannya.

Kegiatan produksi pasti memerlukan modal untuk melakukan kegiatannya untuk memperbesar kapasitas produksinya. Modal yang ditanam dalam suatu kegiatan produktif kita kenal dengan istilah investasi. Besarnya investasi yang ditanam akan memperluas penggunaan tenaga kerja. Semakin banyak investasi yang dilakukan dunia usaha maka akan semakin memperbesar atau memperluas kesempatan kerja. Sebaliknya, jumlah investasi yang kecil akan mempersempit kemampuan dunia usaha dalam melakukan permintaan tenaga kerja. Investasi yang ditanam pada suatu kegiatan produktif di suatu wilayah bisa berupa PMA (Penanaman Modal Asing) dan PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri).

Tenaga kerja yang bekerja pasti akan memperoleh upah sebagai balas jasa atas pekerjaannya. Besarnya ingkat upah yang diberikan sektor usaha merupakan beban biaya yang harus dikeluarkan pengusaha. besarnya tingkat upah yang diberikan pengusaha kepada para buruhnya mengacu kepada peraturan pengupahan yang ditetapkan oleh pemerintah. Semakin besar tingkat upah minimum yang ditetapkan pemerintah, maka akan semakin kecil permintaan perusahaan dalam melakukan permintaan tenaga kerja. Hal ini secara teoritis upah memang tingkat upah berpengaruh negatif terhadap penyerapan tenaga kerja yang dilakukan dunia usaha. Semakin tingginya tingkat upah akan menurunkan permintaan dunia usaha dalam melakukan permintaan terhadap tenaga kerja.

Berdasarkan penjelasan diatas dan untuk memudahkan apa yang telah dijelaskan alur pemikiran pada penelitian ini, maka dapat dilihat pada gambar 2.1 dibawah ini :

**Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran**



## **2.4 Hipotesis**

Berdasarkan perumusan masalah, landasan teori dan penelitian sebelumnya, penulis menyusun suatu hipotesis yang menjadi jawaban sementara dari permasalahan penelitian ini, yaitu:

1. Jumlah unit usaha diduga berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja pada sektor industri pengolahan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat.
2. Investasi PMDN diduga berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja pada sektor industri pengolahan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat.
3. Investasi PMA diduga berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja pada sektor industri pengolahan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat.
4. Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) diduga berpengaruh negatif terhadap penyerapan tenaga kerja pada sektor industri pengolahan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis dan Sumber Data**

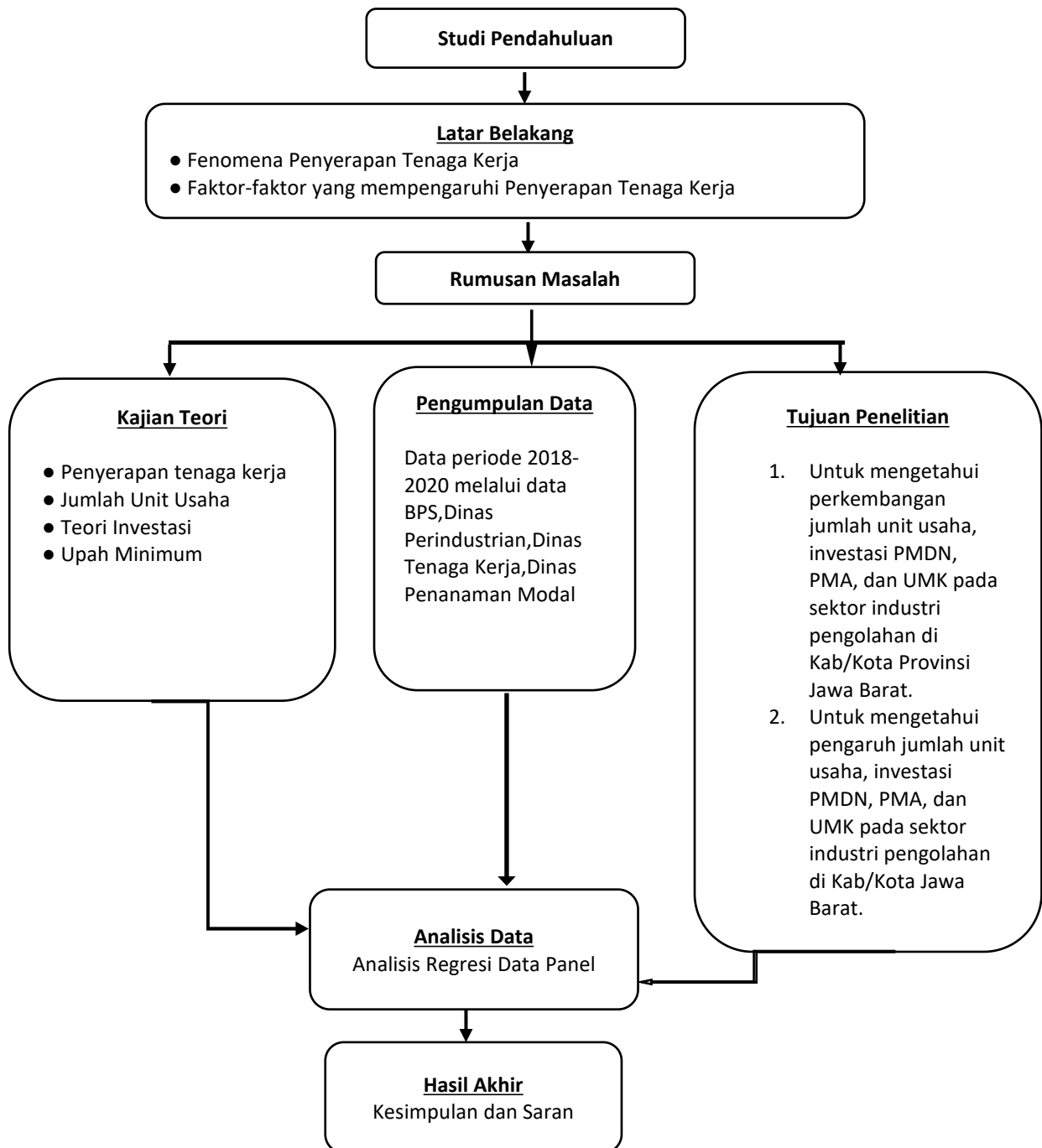
Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis data sekunder. Data sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti dan biasanya dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan dipublikasikan masyarakat. Data sekunder pada penelitian ini diperoleh dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, serta Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Karena data yang diperoleh berupa angka. Dari angka yang diperoleh akan dianalisis lebih lanjut dalam analisis data. Penelitian ini terdiri dari empat variabel, yaitu jumlah unit usaha, investasi PMDN, investasi PMA, UMK sebagai variabel bebas dan penyerapan tenaga kerja sebagai variabel terikat.

Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan penggunaan data numerik. Penelitian ini terdiri dari empat variabel di antaranya adalah jumlah unit usaha, investasi PMDN, investasi PMA, UMK merupakan variabel independen dan penyerapan tenaga kerja merupakan variabel dependen.

## 3.2 Desain Penelitian

Gambar 3.1 Desain Penelitian



### 3.3 Definisi dan Operasional Variabel

Definisi operasional untuk masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi sebagai berikut:

- 1) **Variabel terikat (*Dependent*)** variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah penyerapan tenaga kerja selama tahun 2018-2020 di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat.
- 2) **Variabel bebas (*Independent*)** variabel bebas yang dimasukkan kedalam model analisis penyerapan tenaga kerja ini ada 4 yaitu jumlah unit usaha, investasi PMDN, investasi PMA, dan UMK selama tahun 2018-2020 di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat.

**Tabel 3.1**

**Tabel Operasional Variabel**

No	Nama Variabel	Operasional Variabel	Satuan
1	Tenaga Kerja (Y)	Jumlah Tenaga Kerja di sektor Industri Pengolahan di Kab/Kota Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2020	Jiwa/Tahun
2	Jumlah Unit Usaha (X1)	Banyaknya jumlah unit usaha Industri Pengolahan di Kab/Kota Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2020	Unit/Tahun
3	Investasi PMDN (X2)	Nilai realisasi penanaman modal dalam negeri pada Industri Pengolahan di Kab/Kota Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2020	Rupiah/Tahun

4	Investasi PMA (X3)	Nilai realisasi penanaman modal asing pada Industri Pengolahan di Kab/Kota Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2020	Rupiah/Tahun
5	UMK (X4)	Upah yang diberikan kepada pekerja sesuai standar yang telah ditentukan oleh masing-masing kab/kota di Jawa Barat tahun 2018-2020	Rupiah/Tahun

### 3.4 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdapat beberapa metode yaitu:

- a. studi kepustakaan (*Library Research*) yaitu mencari dan mengumpulkan literatur yang terdiri dari buku-buku referensi, artikel, jurnal penelitian dan media masa yang dapat dijadikan bahan pengutipan penelitian.
- b. Data yang dikumpulkan bersumber dari BPS Jawa Barat, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, serta Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Data yang digunakan dalam analisis statistik regresi ini adalah data panel yaitu gabungan dari data *cross section* dan *time series*.



### **3.5 Metode Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan jenis data yang digunakan yakni data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen yang dipublikasikan secara umum maupun tidak. Penelitian kuantitatif merupakan sebuah penelitian yang didasari dengan angka-angka atau data numerik dan melalui analisis data statistik. Sedangkan untuk menganalisis pengaruh jumlah unit usaha, investasi PMDN, investasi PMA, dan UMK terhadap penyerapan tenaga kerja pada sektor industri pengolahan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat menggunakan analisis regresi data panel dengan menggunakan software Eviews 9.

Pengolahan data penelitian ini menggunakan metoda analisis data panel. Widarjono (2013) mengatakan bahwa mengestimasi model regresi dengan data panel, terdapat beberapa model yang bisa digunakan yaitu *Pooling Least Square/Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM). Uji Chow digunakan untuk memilih antara CEM atau FEM, sedangkan Uji Hausman digunakan untuk memilih antara FEM atau REM. Selanjutnya dilakukan Uji Asumsi Klasik (Uji Multikolinearitas, Uji Heteroskedastisitas, Uji Autokorelasi, serta Uji Normalitas) dan Pengujian Statistik (Uji t, Uji F dan Koefisien Determinasi atau R<sup>2</sup>).

### **3.6 Model Analisis Regresi Data Panel**

Penelitian ini mengolah data dengan menggunakan analisis data kuantitatif, untuk mengetahui apakah variabel independen dapat mempengaruhi variabel dependen. Dalam analisis tersebut dilakukan dengan menggunakan metode regresi data panel. Persamaan regresi data panel adalah sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 JUU_{it} + \beta_2 PMDN_{it} + \beta_3 PMA_{it} + \beta_4 UMK_{it} + e_{it}$$

Dimana:

Y	= Penyerapan Tenaga Kerja
JUU	= Jumlah Unit Usaha
PMDN	= Penanaman Modal Dalam Negeri
PMA	= Penanaman Modal Asing
UMK	= Upah Minimum Kabupaten/Kota
$\beta_0$	= Konstanta (Intersep)
$\beta_1 \beta_2 \beta_3 \beta_4$	= Koefisien Regresi Berganda (Slope)
i	= Kabupaten/Kota di Jawa Barat
t	= tahun 2018-2020
e	= error/residual

Dalam metode regresi data panel dapat dilakukan melalui 3 pendekatan, seperti yang dipaparkan berikut:

### 1. *Common Effect Model (CEM)*

Model yang paling sederhana karena hanya menggabungkan antara data time series dan data cross section ke dalam data panel (pool data).

### 2. *Fixed Effect Model (FEM)*

Model yang mengasumsikan bahwa objek observasi maupun koefisien regresi (slope) tetap besar dari waktu ke waktu. Asumsi model *fixed effect* ini menjelaskan bahwa asumsi slope konstan tetapi intersep bervariasi antar unit dan asumsi slope konstan tetapi intersep bervariasi antar individu atau unit dan antar periode waktu. Estimasi model *fixed effect* dapat dilakukan dengan menggunakan dummy variabel.

### **3. *Random Effect Model (REM)***

Model ini mengasumsikan bahwa perbedaan intersep dan konstanta disebabkan oleh residual/error sebagai akibat perbedaan antar unit dan antar periode waktu yang terjadi secara random.

#### **3.7 Pengujian Asumsi Klasik**

##### **3.7.1 Uji Chow**

Uji Chow merupakan pengujian yang paling tepat digunakan dalam estimasi data panel untuk menentukan antara *common effect* atau *fixed effect*. Nilai chi-square dari hasil uji spesifikasi yang menunjukkan angka  $>0,05$  maka dapat digunakan model *common effect*, sebaliknya jika nilai chi-square dari hasil uji spesifikasi yang menunjukkan angka  $<0,05$  maka yang harus digunakan yaitu model *fixed effect*.

Hipotesis dalam uji chow adalah sebagai berikut:

- a.  $H_0 = \text{Model Common Effect}$
- b.  $H_1 = \text{Model Fixed Effect}$

##### **3.7.2 Uji Hausman**

Uji Hausman merupakan sebagai pengujian statistik dalam memilih apakah model *Fixed Effect* atau *Random Effect* yang paling tepat digunakan. Hasil uji hausman dapat ditentukan apabila nilai chi-square  $>0,05$  maka menggunakan model *random effect*, sebaliknya apabila nilai chi-square  $<0,05$  maka yang digunakan model *fixed effect*.

Hipotesis dalam Uji Hausman adalah sebagai berikut:

- a.  $H_0 = \text{Random Effect Model}$
- b.  $H_1 = \text{Fixed Effect Model}$

### 3.7.3 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas menyatakan bahwa linear sempurna diantara beberapa atau semua variabel yang menjelaskan dari model regresi. Ada atau tidaknya multikolinearitas dapat dilihat koefisien masing-masing variabel bebas. Jika koefisien kolerasi diantara masing-masing variabel bebas lebih dari 0,8 maka terjadi multikolinearitas dan sebaliknya, jika koefisien kolerasi antara masing-masing variabel bebas. Jika koefisien kolerasi diantara masing-masing variabel bebas kurang 0,8 maka tidak terjadi multikolinearitas. Hipotesis yang digunakan dalam uji multikolinearitas yaitu :

- a.  $H_0$  = tidak terdapat multikolinearitas.
- b.  $H_1$  = terdapat multikolinearitas.

### 3.7.4 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain.

Hipotesis dalam uji heteroskedastisitas yaitu :

- a.  $H_0$  = maka tidak terjadi heteroskedastisitas.
- b.  $H_1$  = maka terjadi heteroskedastisitas.

Kriteria uji hipotesis:

a. Jika nilai signifikan  $> 0,05$  maka  $H_0$  diterima, artinya tidak terjadi heteroskedastisitas.

b. Jika nilai signifikan  $< 0,05$  maka  $H_0$  ditolak, artinya terjadi heteroskedastisitas.

### 3.7.5 Uji Autokorelasi

Autokorelasi adalah korelasi antara sesama urutan pengamatan dari waktu ke waktu. Tujuan dari uji autokorelasi ini adalah untuk menguji apakah dalam suatu regresi linier ada korelasi antara residual pada periode  $t$  dengan periode  $t-1$ . Jika terjadi autokorelasi maka dalam persamaan regresi linier tersebut terdapat masalah, karena hasil yang baik seharusnya tidak ada indikasi autokorelasi. Untuk memeriksa adanya autokorelasi biasanya menggunakan metode Durbin-Watson (DW) dengan hipotesis sebagai berikut :

a.  $H_0$  = maka tidak terjadi autokorelasi.

b.  $H_1$  = maka terjadi autokorelasi.

Kriteria uji hipotesis:

- a. Jika  $d < d_L$ , maka  $H_0$  ditolak : artinya terdapat serial korelasi positif antar variabel.
- b. Jika  $d > d_L$ , maka  $H_0$  diterima : artinya terdapat serial korelasi negatif antar variabel.
- c. Jika  $4 - d_U < d < 4 - d_U$ , maka  $H_0$  diterima : artinya tidak terdapat serial korelasi positif maupun negatif antar variabel.
- d. Jika  $d_L < d < d_U$  atau  $4 - d_U < d < 4 - d_L$  : artinya tidak dapat diambil kesimpulan, maka pengujian dianggap tidak meyakinkan.

## 3.8 Pengujian Statistik

### 3.8.1 Uji t

Uji t bertujuan agar peneliti dapat mencari tahu hubungan variabel dari segi individu atau parsial. Hipotesis selalu terdiri dari hipotesis 0 dan hipotesis 1 yang dinilai berpasangan. Perumusan hipotesis statistik, antara hipotesis nol ( $H_0$ ) dan hipotesis alternatif ( $H_1$ ) selalu berpasangan, bila salah satu ditolak maka yang lain

diterima sehingga dapat dibuat keputusan yang tegas, yaitu apabila  $H_0$  ditolak  $H_1$  diterima (Sugiyono, 2018).

Adapun hipotesis dalam pengujian menggunakan uji t yaitu sebagai berikut:

- a.  $H_0$  : Secara parsial variabel bebas tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat.
- b.  $H_1$  : Secara parsial variabel bebas mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

Uji ini dilakukan dengan membandingkan nilai t hitung dengan t tabel dengan ketentuan sebagai berikut :

a.  $t \text{ statistik} < t \text{ tabel}$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak, artinya variabel independen secara parsial tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen.

b.  $t \text{ statistik} > t \text{ tabel}$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, artinya variabel independen secara parsial mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen.

### 3.8.2 Uji F

Uji F bertujuan untuk mencari apakah variabel independen secara bersama – sama (stimultan) mempengaruhi variabel dependen. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan derajat signifikan nilai F.

- a.  $H_0: \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$ , “artinya secara bersama-sama variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikat”.
- b.  $H_1: \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq 0$ , “artinya secara bersama-sama variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat”.

Uji ini dilakukan dengan membandingkan nilai F hitung dengan F tabel dengan ketentuan sebagai berikut :

- c.  $F \text{ statistik} < F \text{ tabel}$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak, artinya variabel independen secara bersama-sama tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen.
- d.  $F \text{ statistik} > F \text{ tabel}$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  diterima, artinya variabel independen secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen.

### 3.8.3 Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel independent atau bebas dalam menerangkan secara keseluruhan terhadap variabel dependen atau terikat serta pengaruhnya secara potensial dapat diketahui dari besarnya nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ).

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) dapat dipakai untuk memprediksi seberapa besar pengaruh kontribusi variabel independen ( $X$ ) terhadap variabel dependen ( $Y$ ) dengan syarat hasil uji  $F$  dalam analisis regresi bernilai signifikan. Besarnya nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) hanya antara 0-1 ( $0 < R^2 < 1$ ). Semakin kecil nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) berarti pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen semakin lemah. Jika nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) semakin mendekati 1 berarti pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen semakin kuat (Sugiyono, 2016)

